

Generasi Z Sebagai Penjaga Nilai (Rekonstruksi Budaya Integritas di Tengah Negara dengan Tingkat Korupsi Tinggi)

Nasywa Putri Rasyidah¹, Endah Wahyuningsih²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul Ulum, Jombang, Indonesia

Nasywaptr.rr@gmail.com ; endahsetiyanto@gmail.com

*Corresponding author: endahsetiyanto@gmail.com

Abstrak

Korupsi yang mengakar secara budaya dan struktural telah melemahkan legitimasi negara dan merusak nilai integritas publik. Generasi Z, yang tumbuh dalam konteks sosial sarat ketidakadilan, menunjukkan potensi sebagai agen generasional yang mampu membentuk subkultur nilai antikorupsi. Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana Gen Z membangun kesadaran nilai, strategi kolektif, dan memanfaatkan peluang struktural untuk menantang budaya permisif korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik berbasis studi kepustakaan terhadap 23 artikel jurnal bereputasi yang diseleksi secara sistematis, lalu dianalisis dengan sintesis tematik naratif untuk memetakan pola kesadaran nilai, strategi digital, serta peluang dan hambatan budaya-struktural. Temuan menunjukkan bahwa kesadaran nilai Gen Z terbentuk secara resistif terhadap konstruksi sosial budaya korupsi (Berger & Luckmann), diperkuat kesadaran generasional (Mannheim), dan dimanifestasikan melalui strategi digital yang mereproduksi struktur baru (Giddens). Mereka membangun komunitas nilai untuk menciptakan *counter-hegemony* terhadap budaya dominan koruptif (Gramsci), sehingga berpotensi menjadi *value guardian* yang mendorong perubahan nilai publik dari bawah.

Kata kunci: Generasi Z, korupsi, konstruksi sosial, hegemoni, nilai publik.

Abstract

Corruption that is deeply rooted in cultural and structural systems has undermined state legitimacy and eroded public integrity values. Generation Z, who grew up in a social context marked by systemic injustice, shows potential as a generational agent capable of shaping an anti-corruption value subculture. This study aims to examine how Gen Z develops value awareness, collective strategies, and utilizes structural opportunities to challenge the permissive culture of corruption. This research employs a descriptive-analytical approach based on a literature study of 23 systematically selected reputation journal articles, analyzed using narrative thematic synthesis to map patterns of value awareness, digital strategies, and cultural-structural opportunities and barriers. The findings reveal that Gen Z's value awareness is formed resistively against the social construction of corruption (Berger & Luckmann), reinforced by generational consciousness (Mannheim), and manifested through digital strategies that reproduce new structures (Giddens). They build value-based communities to create a counter-hegemony against the dominant corrupt culture (Gramsci), thus positioning themselves as value guardians capable of driving public value transformation from the bottom up.

Keywords: Generation Z, corruption, social construction, hegemony, public values.

A. PENDAHULUAN

Tingginya tingkat korupsi di berbagai negara berkembang telah menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keberlanjutan integritas publik dan stabilitas sosial, sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar tentang siapa aktor yang dapat diandalkan untuk mengembalikan nilai kejujuran dan akuntabilitas di ruang publik. Korupsi bukan hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik, memperdalam kesenjangan sosial, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Korupsi bahkan menjadi determinan ketimpangan sosial-ekonomi, karena memperburuk distribusi layanan publik yang pada akhirnya menciptakan siklus ketidakadilan yang sulit diputus (Achim et al., 2020). Lebih jauh, penindakan hukum terhadap pelaku korupsi pun tidak cukup membongkar budaya korupsi karena praktik ini telah mengakar dalam jaringan patronase, lemahnya keteladanan pemimpin, dan rapuhnya lembaga pengawas (Artello & Albanese, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa upaya memberantas korupsi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan struktural top-down semata, tetapi harus disertai rekonstruksi nilai secara sosial. Dalam konteks inilah muncul kebutuhan untuk mengeksplorasi kemungkinan peran generasi baru, khususnya Generasi Z, untuk tampil sebagai penjaga nilai integritas di tengah negara yang didera budaya korupsi mengakar.

Generasi Z merupakan kelompok usia yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, yang kini sedang memasuki masa produktif dan mendominasi populasi pemilih muda di berbagai negara. Mereka dikenal sebagai generasi digital native yang intens memanfaatkan media sosial, terbuka terhadap nilai-nilai global, dan kritis terhadap penyimpangan. Studi tentang perilaku politik mereka menunjukkan bahwa Gen Z merupakan basis pemilih terbesar yang mendasarkan pilihan politiknya pada nilai keautentikan, keadilan, dan transparansi, serta banyak dipengaruhi oleh media sosial (Tinambunan et al., 2024). Polydorou menegaskan bahwa Gen Z memiliki kesadaran nilai keberlanjutan yang tinggi dan cenderung membangun kolaborasi lintas sektor untuk mendorong perubahan sosial (Polydorou, 2023). Sementara itu, meskipun tingkat *Fear of Missing Out* (FoMO) politik mereka relatif rendah, tekanan sosial dan pengaruh influencer politik di media sosial dapat memicu partisipasi politik mereka (Oktaviani, 2022). Ketiga studi ini menunjukkan bahwa Gen Z memiliki kesadaran nilai yang relatif kuat dan kapasitas mobilisasi digital yang tinggi, yang keduanya dapat menjadi modal untuk membentuk mereka sebagai penjaga nilai publik. Namun, hingga kini mereka masih lebih sering diposisikan sebagai pemilih atau partisipan politik, bukan sebagai agen pembentuk nilai tandingan terhadap budaya korupsi. Inilah yang menandakan perlunya penelitian baru untuk menggeser pandangan tentang Gen Z dari objek menjadi subjek perubahan nilai.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat Gen Z tumbuh dalam ekosistem sosial yang sangat permisif terhadap korupsi, di mana praktik penyimpangan tidak hanya

dilakukan secara individu tetapi telah terinstitusionalisasi. Di Nepal, misalnya, korupsi telah menjadi bagian dari jaringan sosial dan dianggap sebagai strategi bertahan hidup, bukan semata pelanggaran hukum (Subedi, 2019). Dalam sektor kehutanan Nepal, korupsi bahkan membentuk sebuah “sistem” yang mencakup promosi, mutasi, perizinan, hingga pengawasan, dan aktor yang menolak terlibat justru dianggap mengganggu harmoni birokrasi (Khatri et al., 2022). Penelitian eksperimental membuktikan bahwa budaya *legal nihilism* (ketidakpercayaan pada hukum) dan *ethical dualism* (pemisahan etika publik-pribadi) meningkatkan toleransi terhadap perilaku koruptif karena menciptakan pembenaran sosial bagi penyimpangan (Fürstenberg et al., 2023). Lebih jauh, sikap permisif terhadap suap bahkan terbukti diwariskan hingga generasi kedua pada imigran dari negara korup, menunjukkan kuatnya pewarisan budaya korupsi lintas generasi (Simpser, 2020). Temuan-temuan ini menegaskan bahwa korupsi telah membentuk jaringan nilai yang menormalisasi penyimpangan, sehingga upaya menolak korupsi berarti menantang budaya dominan yang diwariskan antar generasi. Dalam konteks ini, peran Gen Z sebagai penjaga nilai bukan hanya tantangan politik, tetapi juga tantangan kultural untuk memutus rantai pewarisan budaya permisif.

Selain menghadapi tantangan budaya, Gen Z juga harus berhadapan dengan kegagalan tata kelola negara yang membuat nilai integritas sulit tumbuh dari atas. Pendekatan top-down dalam proyek energi terbarukan di Indonesia terbukti gagal membangun rasa kepemilikan publik dan justru menciptakan ruang bagi penyimpangan, sedangkan model polycentric di Nepal sempat menumbuhkan rasa tanggung jawab komunitas (Ha & Kumar, 2021). Demikian pula, reformasi birokratis top-down gagal menekan korupsi di layanan kesehatan Asia Selatan dan Asia Tenggara, sementara pendekatan berbasis komunitas berhasil menumbuhkan integritas (Naher et al., 2020). Kedua studi ini memperlihatkan bahwa nilai kejujuran dan akuntabilitas lebih efektif ditanamkan melalui pendekatan partisipatif dari bawah, bukan melalui pengawasan hierarkis dari atas. Maka, jika Gen Z ingin menjadi penjaga nilai, mereka harus membangun gerakan nilai dari bawah yang menumbuhkan rasa kepemilikan publik terhadap integritas. Pendekatan ini sekaligus menjadi peluang karena krisis legitimasi negara menciptakan kekosongan moral yang dapat diisi oleh generasi baru, sebagaimana diungkapkan bahwa legitimasi negara bergantung pada persepsi publik terhadap kejujuran (*candor*), bukan hanya kepatuhan prosedural (Schnell et al., 2024).

Hubungan penelitian ini dengan literatur yang ada sangat jelas, karena seluruh studi terdahulu memperlihatkan elemen-elemen pembentuk kapasitas Gen Z sebagai penjaga nilai, sekaligus tantangan besar yang mereka hadapi. Gen Z terbukti mampu memobilisasi diri secara cepat melalui media sosial, membentuk narasi moral bersama, dan mengonsolidasikan solidaritas lintas kampus (Bukit et al., 2021; Hasna, 2022; Nofrima & Qodir, 2021). Mereka juga dapat membangun representasi moral kolektif dengan teknik *depersonalized remix* yang membuat pesan mereka kuat secara moral sekaligus tahan

terhadap serangan personal (Gitomer et al., 2024). Namun, keberhasilan gerakan sosial sangat ditentukan oleh konsolidasi organisasi dan kesinambungan partisipasi agar dapat menginstitutionalisasi nilai (Muhammad Fadly, 2022). Di sisi lain, budaya hierarkis dan kolektivistik menjadi hambatan karena menekan akuntabilitas dan menormalisasi penyalahgunaan kekuasaan (Scholl & Schermuly, 2020). Maka, penelitian ini menghubungkan dua kelompok literatur: studi tentang potensi nilai Gen Z dan studi tentang ekosistem sosial korup yang harus mereka tantang, untuk merumuskan model bagaimana Gen Z dapat merekonstruksi budaya integritas di negara dengan tingkat korupsi tinggi.

Kajian tentang korupsi selama dua dekade terakhir telah membentuk state of the art pemahaman bahwa korupsi bukan sekadar penyimpangan individu, melainkan fenomena sosial-budaya yang terinstitutionalisasi dalam jaringan patronase, budaya *legal nihilism* dan *ethical dualism*, serta dipandang sebagai strategi bertahan hidup, sehingga sulit diberantas hanya melalui mekanisme hukum (Artello & Albanese, 2022; Fürstenberg et al., 2023; Subedi, 2019). Namun, meskipun telah banyak membahas determinan struktural, kultural, dan psikologisnya, literatur yang ada belum menyoroti dimensi generasional sebagai subjek pembentuk nilai publik, sehingga terdapat research gap mengenai siapa aktor sosial yang mampu memulai transformasi nilai antikorupsi. Di sisi lain, studi tentang Gen Z menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran nilai keadilan, keautentikan, dan transparansi, serta kemampuan mobilisasi digital yang tinggi (Oktaviani, 2022; Polydorou, 2023; Tinambunan et al., 2024). Mereka terbukti mampu memobilisasi solidaritas lintas kampus, menciptakan narasi moral bersama, dan membangun representasi kolektif yang melindungi individu dari kriminalisasi (Gitomer et al., 2024; Hasna, 2022; Nofrima & Qodir, 2021). Meskipun demikian, belum ada penelitian yang mengaitkan kapasitas ini dengan upaya melawan budaya permisif korupsi, padahal mereka tumbuh dalam konteks sosial yang sarat penyimpangan nilai dan krisis legitimasi negara.

Untuk menjawab kekosongan tersebut, penelitian ini memanfaatkan kerangka teori sosiologi agar mampu menelaah Gen Z bukan hanya sebagai kelompok usia, melainkan sebagai aktor sosial yang membentuk nilai publik. Teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann (1966) digunakan untuk menjelaskan bagaimana nilai korupsi dilembagakan melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi; teori generasi Mannheim (1952) digunakan untuk memahami terbentuknya kesadaran generasional yang lahir dari pengalaman historis bersama menghadapi kegagalan institusi publik; teori strukturasi Giddens (1984) dipakai untuk melihat bagaimana Gen Z sebagai agen mampu mereproduksi dan mengubah struktur sosial; serta konsep hegemoni Gramsci (1971) digunakan untuk menafsirkan upaya Gen Z membangun nilai tandingan (*counter-hegemony*) terhadap budaya dominan koruptif. Keempat kerangka ini memberi landasan konseptual bagi analisis tentang pembentukan kesadaran nilai, strategi kolektif, serta

peluang dan hambatan struktural yang dihadapi Gen Z dalam membentuk subkultur integritas publik.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menawarkan novelty dengan menempatkan Gen Z bukan sekadar sebagai partisipan politik, melainkan sebagai subjek historis pembentuk nilai publik yang membangun subkultur integritas untuk menantang budaya korupsi. Pendekatan ini sekaligus menjadi bentuk orisinalitas karena menggabungkan dua rumpun literatur yang sebelumnya terpisah: kajian korupsi yang berfokus pada struktur makro dan kajian generasi muda yang bersifat sosiokultural mikro. Penelitian sebelumnya tentang korupsi menekankan solusi struktural top-down, padahal terbukti gagal membangun akuntabilitas (Ha & Kumar, 2021; Naher et al., 2020). Sementara studi tentang generasi belum membahas bagaimana mereka memutus rantai pewarisan nilai permisif terhadap korupsi yang terbukti diwariskan lintas generasi (Simpser, 2020). Dengan menggeser fokus dari *state-centric* ke *generation-centric*, penelitian ini menegaskan bahwa perubahan nilai publik tidak harus menunggu reformasi institusi negara, tetapi dapat digerakkan dari bawah melalui gerakan nilai generasional. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi memperbarui state of the art kajian antikorupsi dengan menghadirkan kerangka baru yang memandang Gen Z sebagai *value guardian* yang membentuk identitas kolektif untuk merekonstruksi budaya integritas publik.

Berdasarkan keseluruhan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Generasi Z membentuk kesadaran nilai dan identitas generasional mereka di tengah budaya korupsi yang terinstitusionalisasi, bagaimana mereka memanfaatkan strategi kolektif, teknologi digital, dan jaringan sosial untuk menegakkan nilai integritas di luar saluran formal negara yang gagal menjalankan akuntabilitas, serta bagaimana peluang dan hambatan budaya memengaruhi upaya mereka membentuk subkultur nilai antikorupsi. Penelitian ini penting karena menawarkan paradigma baru dalam kajian antikorupsi, yaitu dengan memindahkan fokus dari pendekatan *state-centric* ke *generation-centric*, yang menempatkan generasi muda sebagai aktor utama rekonstruksi nilai publik. Pendekatan ini berangkat dari temuan bahwa perubahan struktural saja tidak cukup menurunkan korupsi tanpa perubahan budaya (Scholl & Schermuly, 2020), dan bahwa budaya hanya dapat diubah jika ada agen sosial baru yang memutus rantai pewarisan nilai permisif (Simpser, 2020). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam merumuskan strategi rekonstruksi budaya integritas di negara dengan tingkat korupsi tinggi melalui peran generasi baru.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik berbasis studi kepustakaan, yang dirancang untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial melalui penelusuran dan analisis kritis terhadap literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji isu secara konseptual dan lintas disiplin, tanpa harus mengumpulkan data lapangan, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian ini yang menelaah konstruksi nilai Generasi Z dalam konteks budaya korupsi yang mengakar.

Data penelitian diperoleh dari 23 artikel jurnal bereputasi terindeks yang membahas topik generasi muda, budaya korupsi, tata kelola publik, nilai integritas, dan gerakan sosial digital. Seleksi dilakukan melalui penyaringan judul dan abstrak, pembacaan penuh, dan penelusuran sitasi mundur-maju (*backward-forward citation tracking*) hingga mencapai kejenuhan informasi.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan tematik deskriptif, melalui proses pengodean terbuka untuk menemukan isu-isu utama, pengelompokan tema, dan sintesis naratif. Analisis diarahkan pada tiga fokus: (1) pembentukan kesadaran nilai dan identitas generasional Gen Z, (2) strategi kolektif-digital dalam menegakkan integritas, dan (3) peluang serta hambatan budaya-struktural dalam membentuk subkultur nilai antikorupsi. Hasil sintesis ini menjadi dasar untuk merumuskan pemahaman konseptual mengenai peran Gen Z sebagai *value guardian* dalam merekonstruksi budaya integritas publik.

C. HASIL DAN DISKUSI

1. Kesadaran Nilai dan Identitas Generasional Gen Z (dengan teori)

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran nilai Generasi Z terbentuk secara reaktif-resistif terhadap lingkungan sosial yang ditandai oleh korupsi terinstitusionalisasi lintas struktur dan generasi. Korupsi bukan hanya hadir sebagai penyimpangan perilaku individu, melainkan sebagai bagian dari jaringan sosial dan strategi bertahan hidup yang dilembagakan secara budaya dan struktural (Subedi, 2019). Dalam sektor kehutanan Nepal, praktik-praktik korupsi seperti mutasi jabatan, promosi, perizinan, dan pengawasan dijalankan sebagai bagian dari “sistem” kelembagaan, sehingga menolak terlibat justru dianggap mengganggu harmoni (Khatrri et al., 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai koruptif telah melewati proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sehingga menjadi kenyataan sosial yang diterima (Berger & Luckmann). Konteks ini memaksa generasi muda mendefinisikan posisi moral secara kontras agar tidak larut dalam sistem lama. Mereka menyaksikan langsung dampak korupsi berupa

ketimpangan layanan publik, rendahnya kualitas kesehatan, dan peningkatan mortalitas yang memperparah ketidakadilan sosial (Achim et al., 2020). Paparan terhadap kerusakan sosial inilah yang menumbuhkan sensitivitas moral Gen Z terhadap ketidakadilan, sehingga mereka memandang integritas sebagai nilai fundamental yang harus ditegakkan untuk menjamin masa depan sosial mereka sendiri.

Dari sisi psikologis, kesadaran nilai ini diperkuat oleh rendahnya *Belief in a Just World* (BJW) yang lazim pada kelompok usia muda. Individu dengan BJW rendah cenderung tidak menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang wajar dan lebih siap menantangnya secara aktif (Garcia et al., 2020). Ini menjelaskan mengapa Gen Z cenderung bersikap kritis terhadap penyimpangan, berbeda dengan generasi sebelumnya yang terbiasa menoleransi ketimpangan. Mereka juga mengalami ketegangan budaya antara nilai lokal yang hierarkis dengan nilai global yang egaliter, yang mendorong kebutuhan untuk membentuk identitas generasional mereka melalui penolakan terhadap budaya dominan yang gagal menjaga keadilan. Menurut Mannheim, generasi terbentuk dari pengalaman sejarah yang sama yang menciptakan kesadaran kolektif generasional (*generational consciousness*) untuk membedakan diri dari generasi sebelumnya (Bristow, 2016). Dengan demikian, pembentukan identitas nilai Gen Z dapat dipahami sebagai strategi resistensi generasional terhadap budaya dominan yang menopang korupsi, bukan sekadar adopsi nilai dari generasi sebelumnya (Scholl & Schermuly, 2020).

Selain itu, paparan intens terhadap media sosial mempercepat internalisasi nilai keadilan di kalangan Gen Z. Meskipun tingkat *Fear of Missing Out* (FoMO) politik mereka rendah, tekanan sosial dan pengaruh influencer memicu keterlibatan mereka dalam isu publik (Oktaviani, 2022). Mereka membentuk identitas moral sebagai agen perubahan sosial yang bertanggung jawab memperbaiki kerusakan akibat kelalaian generasi sebelumnya, serta memanfaatkan jaringan lintas sektor untuk memperkuat orientasi nilai kolektif (Polydorou, 2023). Dengan demikian, kesadaran nilai Gen Z merupakan hasil dialektika antara pengalaman lokal yang sarat penyimpangan dan ekspektasi global atas keadilan, yang memicu kebutuhan membentuk identitas generasional berbasis integritas. Temuan ini konsisten dengan pandangan bahwa korupsi tidak hanya persoalan hukum, tetapi budaya yang diwariskan lintas generasi (Simpser, 2020). Sehingga melawannya memerlukan perubahan identitas generasional, bukan hanya reformasi struktural.

Jadi pengungkapan bahwa kesadaran nilai Gen Z bersifat resistif, bukan reproduktif, terhadap budaya dominan. Ini penting karena membantah asumsi bahwa generasi muda sekadar mewarisi nilai koruptif dari generasi sebelumnya, dan sebaliknya menunjukkan bahwa pengalaman langsung atas kerusakan sosial dapat menjadi dasar pembentukan nilai antikorupsi. Dalam bidang sosiologi, temuan ini memperluas teori konstruksi sosial (Berger & Luckmann, 1966) dan teori generasi, bahwa identitas generasi bukan hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi atau teknologi, tetapi juga oleh pengalaman moral menghadapi kegagalan institusi publik (Bristow, 2016). Bagi penelitian ini, hasil tersebut

menegaskan bahwa Gen Z memiliki posisi epistemik unik untuk menjadi penjaga nilai karena mereka membentuk nilai bukan dari struktur lama, melainkan sebagai penolakan terhadap struktur tersebut.

2. Strategi Kolektif, Mekanisme, dan Media Gen Z

Gen Z telah mengembangkan strategi kolektif berbasis digital untuk membangun solidaritas, jejaring sosial, dan representasi nilai kolektif dalam menegakkan integritas publik di luar saluran formal negara. Gerakan Gejayan Memanggil menjadi bukti kuat bahwa mahasiswa lintas kampus mampu memobilisasi diri secara spontan untuk menolak kebijakan yang dianggap tidak adil, membangun narasi moral bersama, dan menciptakan tekanan publik terhadap negara (Nofrima & Qodir, 2021). Media sosial menjadi arena produksi makna yang memungkinkan penyebaran nilai secara horizontal dan non-hierarkis, mempercepat konsolidasi emosi publik, dan membentuk rasa keadilan kolektif (Hasna, 2022). Menurut Giddens, struktur sosial tidak hanya membatasi tetapi juga menjadi medium yang diproduksi dan direproduksi melalui tindakan agen (*duality of structure*), sehingga Gen Z dapat menggunakan ruang digital untuk membentuk struktur nilai baru meski berada dalam kendali negara (Longhofer & Winchester, 2016). Karakter jaringan yang cair ini membuat gerakan Gen Z sulit dikendalikan, karena mereka tidak beroperasi dalam struktur hierarkis melainkan dalam ekosistem nilai terbuka yang mereka bentuk sendiri.

Selain membangun solidaritas, Gen Z menggunakan strategi representasi moral kolektif untuk memperkuat pesan nilai sekaligus melindungi individu dari kriminalisasi negara. Aktivis Gen Z di TikTok memanfaatkan teknik *depersonalized remix* untuk mereproduksi konten sosial secara kolektif tanpa menonjolkan identitas individu, sehingga pesan tampil sebagai produk komunitas nilai, bukan pernyataan personal (Gitomer et al., 2024). Strategi ini meningkatkan kekuatan simbolik pesan sekaligus menurunkan risiko persekusi personal. Menurut Castells, jaringan digital memungkinkan produksi makna secara kolaboratif dan desentralistik, menciptakan kekuatan komunikasi horizontal yang dapat menantang struktur dominan (Krolo, 2013). Dengan demikian, Gen Z mampu mengangkat isu keadilan tanpa harus menempatkan individu sebagai sasaran serangan. Mereka juga membentuk jaringan solidaritas lintas sektor dengan menggandeng organisasi sosial, media independen, dan komunitas kreatif untuk memperluas basis dukungan terhadap nilai integritas (Polydorou, 2023).

Strategi Gen Z bersifat komunitarian karena menekankan partisipasi horizontal dan kesetaraan nilai, bukan elitis. Mereka membentuk komunitas nilai berbasis kesamaan kepedulian yang kemudian menjadi basis dukungan moral bagi aksi kolektif. Strategi ini sejalan dengan bukti bahwa pendekatan berbasis komunitas lebih efektif menumbuhkan integritas dibanding pengawasan top-down yang birokratis (Naher et al., 2020). Dalam komunitas nilai ini, integritas tidak dipandang sebagai slogan moral abstrak, tetapi

dipraktikkan sebagai standar perilaku sehari-hari yang divalidasi sosial. Dengan demikian, strategi Gen Z menegaskan integritas bersandar pada tiga elemen utama: mobilisasi digital, representasi kolektif, dan pembentukan komunitas nilai. Jadi Gen Z tidak hanya memiliki nilai antikorupsi, tetapi juga membangun infrastruktur sosial untuk menyebarkan dan mempertahankannya. Ini menegaskan bahwa perubahan nilai tidak harus dimulai dari negara, melainkan dapat dibentuk secara horizontal oleh komunitas generasional. Temuan ini memperkaya teori gerakan sosial kontemporer dengan menekankan pergeseran dari organisasi formal ke jaringan cair berbasis nilai, dan menunjukkan bahwa Gen Z bukan hanya penerima nilai, melainkan produsen nilai yang mampu membangun ruang sosial tandingan di luar negara untuk menegaskan integritas.

3. Peluang dan Hambatan Budaya, Struktural, dan Tata Kelola

Peluang terbesar bagi Gen Z membentuk subkultur nilai antikorupsi justru muncul dari krisis legitimasi negara akibat kegagalan tata kelola. Proyek publik top-down gagal menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat, sehingga justru memicu penyimpangan karena tidak memberi ruang partisipasi (Ha & Kumar, 2021). Reformasi birokratis top-down juga terbukti tidak efektif menekan korupsi, sementara pendekatan berbasis komunitas berhasil menumbuhkan integritas (Naher et al., 2020). Kondisi ini menciptakan kekosongan moral yang membuka ruang bagi aktor non-negara seperti Gen Z untuk mengambil peran sebagai sumber nilai alternatif. Menurut Giddens, struktur sosial bersifat ganda (*duality of structure*) karena membatasi sekaligus memungkinkan agen untuk bertindak, sehingga krisis legitimasi justru dapat dimanfaatkan Gen Z untuk mereproduksi struktur baru berbasis nilai integritas (Longhofer & Winchester, 2016). Ketika kepercayaan publik terhadap negara melemah, masyarakat menjadi lebih terbuka menerima nilai dari sumber non-formal, termasuk dari generasi muda. Situasi ini menjadi jendela peluang strategis bagi Gen Z untuk memperkenalkan nilai integritas tanpa harus bersaing langsung dengan negara sebagai otoritas nilai tunggal.

Namun, hambatan utama datang dari budaya sosial yang hierarkis dan kolektivistik, yang menekan ekspresi nilai individual dan mendorong konformitas terhadap jaringan patronase. Negara dengan budaya *power distance* tinggi dan kolektivistik memiliki tingkat korupsi lebih tinggi karena mekanisme kontrol sosialnya lemah dan loyalitas personal lebih diutamakan daripada akuntabilitas publik (Scholl & Schermuly, 2020). Lebih jauh, sikap permisif terhadap suap bahkan diwariskan dalam keluarga dan komunitas hingga generasi kedua (Simpser, 2020). Artinya, Gen Z tidak hanya menantang negara, tetapi juga nilai yang ditanamkan keluarga mereka sendiri. Hambatan ini diperkuat oleh budaya *legal nihilism* dan *ethical dualism* yang menormalisasi penyimpangan selama tidak merusak relasi personal (Fürstenberg et al., 2023). Dalam kerangka Gramsci, nilai permisif ini dapat dipahami sebagai bentuk hegemoni budaya—yakni dominasi nilai yang diterima secara sukarela oleh masyarakat karena telah membentuk kesadaran mereka (Hodgkinson &

Foley, 2003). Karena itu, perjuangan Gen Z membangun subkultur nilai antikorupsi berarti menantang hegemoni ini dengan menciptakan *counter-hegemony* yang mendefinisikan ulang makna integritas. Dalam budaya seperti ini, memperjuangkan integritas sering dipandang sebagai ancaman terhadap harmoni sosial, bukan tindakan mulia, sehingga menciptakan tekanan sosial bagi Gen Z.

Meski demikian, Gen Z memiliki peluang mengatasi hambatan ini melalui strategi membentuk komunitas nilai yang memvalidasi integritas sebagai norma baru. Gerakan Gejayan Memanggil menunjukkan bahwa mereka mampu menciptakan narasi nilai yang menantang budaya dominan (Hasna, 2022; Nofrima & Qodir, 2021). Representasi moral kolektif yang mereka bangun juga memperkuat perlindungan sosial terhadap anggotanya (Gitomer et al., 2024). Subkultur nilai ini menjadi penting karena menyediakan ruang sosial yang mengakui dan memperkuat nilai integritas, sehingga perlahan dapat menggantikan nilai permisif yang menopang korupsi. Dengan membentuk *counter-hegemony* melalui komunitas nilai ini, Gen Z tidak hanya menolak nilai lama, tetapi juga membangun tatanan makna baru yang dapat menggantikan budaya dominan koruptif. Namun, keberhasilan ini bergantung pada kemampuan mereka memperluas basis sosial dan mempertahankan konsistensi nilai agar tidak berhenti sebagai gerakan elitis. Perjuangan Gen Z membentuk subkultur nilai antikorupsi bukan hanya aksi moral, tetapi tantangan terhadap struktur sosial dominan. Ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup dengan memperkuat lembaga, tetapi harus melibatkan transformasi budaya, dan transformasi ini hanya mungkin terjadi bila ada generasi baru yang membangun subkultur nilai tandingan.

D. DISKUSI

Temuan penelitian ini menunjukkan kemunculan Generasi Z sebagai aktor generasional yang mampu menolak sekaligus merekonstruksi nilai budaya dominan dalam konteks sosial yang telah dihegemoni oleh korupsi. Hal ini menegaskan konsep *kesadaran generasional* (*generational consciousness*) Mannheim (1952) bahwa pengalaman historis yang sama membentuk identitas kolektif dan membedakan satu generasi dari generasi lainnya. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang cenderung menormalisasi korupsi sebagai bagian dari budaya birokrasi, Gen Z membangun identitas mereka melalui proses oposisi, memosisikan diri sebagai agen moral yang bertugas memperbaiki kegagalan institusi. Pola pembentukan identitas resistif ini konsisten dengan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann (1966), yang menjelaskan bahwa realitas sosial terus-menerus diproduksi dan dapat diubah ketika aktor baru menolak norma yang telah diinternalisasi dan menafsirkannya ulang melalui sistem makna alternatif.

Selain itu, strategi kolektif yang dikembangkan Gen Z memperlihatkan relevansi konsep *duality of structure* Giddens (1984), bahwa struktur sosial bukan hanya membatasi,

tetapi juga diproduksi dan direproduksi melalui tindakan agen. Dengan memanfaatkan platform digital, Gen Z menciptakan arena produksi makna di luar saluran formal negara, membentuk jaringan solidaritas yang bersifat horizontal dan terdesentralisasi. Jaringan ini memungkinkan produksi nilai secara kolaboratif dan mampu melewati kontrol hierarkis, sejalan dengan pandangan Castells bahwa ruang digital memberikan kekuatan komunikasi horizontal yang dapat menantang struktur mapan. Kondisi ini menandai pergeseran paradigma dari pewarisan nilai menuju produksi nilai, di mana Gen Z bukan lagi penerima pasif, melainkan produsen aktif nilai integritas melalui mobilisasi digital dan representasi moral kolektif.

Namun, perjuangan Gen Z berlangsung dalam lingkungan budaya hegemonik yang menormalisasi korupsi sebagai bagian dari relasi sosial sehari-hari. Konsep hegemoni budaya Gramsci (1971) berguna untuk memahami bagaimana sikap permisif terhadap korupsi terus bertahan karena diterima secara sukarela sebagai “akal sehat” bersama. Dengan membentuk komunitas nilai dan membangun *counter-hegemony*, Gen Z menantang tatanan moral yang telah diterima begitu saja dan menawarkan integritas sebagai jangkar normatif baru. Proses ini menandai transformasi budaya yang penting karena menggeser integritas dari prinsip abstrak menjadi praktik keseharian yang divalidasi secara sosial. Dalam konteks ini, gerakan Gen Z tidak hanya bersifat etis, tetapi juga politis—karena merebut kembali kekuasaan untuk mendefinisikan nilai kolektif yang selama ini dimonopoli oleh institusi negara dan jaringan patronase.

Temuan ini memperluas pemahaman teoritis tentang upaya pemberantasan korupsi yang selama ini didominasi kerangka reformasi kelembagaan, dengan menunjukkan bahwa perubahan yang berkelanjutan membutuhkan rekonstruksi budaya dari bawah. Sementara studi sebelumnya (Ha & Kumar, 2021; Naher et al., 2020) menekankan reformasi struktural, penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa adanya aktor generasional yang menginternalisasi dan menyebarkan nilai baru, reformasi kelembagaan berisiko mereproduksi norma koruptif yang sama. Karena itu, kemunculan Gen Z sebagai *penjaga nilai* (*value guardians*) merupakan fenomena sosiologis baru: mereka menjadi gerakan tandingan generasional yang membingkai integritas sebagai identitas kolektif, bukan sekadar prosedur administratif. Ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan perspektif kultural, generasional, dan teknologi dalam merancang strategi antikorupsi.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Generasi Z memiliki potensi unik sebagai penjaga nilai yang dapat merekonstruksi budaya integritas di tengah negara dengan tingkat korupsi tinggi. Kesadaran nilai mereka terbentuk secara reaktif-resistif terhadap lingkungan sosial yang menormalisasi penyimpangan, yang dalam kerangka Berger dan

Luckmann dapat dipahami sebagai hasil konstruksi sosial: korupsi telah melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sehingga menjadi kenyataan sosial yang diterima. Dalam konteks ini, Gen Z justru muncul sebagai agen yang menolak konstruksi dominan dan membangun konstruksi alternatif berbasis nilai integritas. Proses resistensi ini sekaligus menunjukkan bahwa kesadaran moral generasi bukan hanya hasil kondisi teknologi atau ekonomi, tetapi lahir dari pengalaman historis kolektif menghadapi kegagalan institusi publik sehingga membentuk *generational consciousness*. Dengan demikian, identitas Gen Z sebagai generasi terbentuk melalui penolakan terhadap struktur nilai lama yang koruptif.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa Gen Z mengembangkan strategi kolektif melalui jaringan digital untuk menyebarkan nilai integritas, memperkuat solidaritas, dan membangun komunitas nilai. Dalam perspektif Giddens, tindakan mereka memperlihatkan *duality of structure*, mereka membentuk struktur sosial baru berbasis integritas, sekaligus dibentuk oleh keterbatasan struktur negara. Sementara itu, cara mereka memanfaatkan media sosial secara horizontal, non-hierarkis, dan desentralistik dimana jaringan digital dapat menjadi arena produksi makna yang menantang dominasi negara. Strategi representasi moral kolektif seperti *depersonalized remix* menunjukkan bahwa Gen Z tidak hanya menyebarkan nilai, tetapi juga membangun infrastruktur sosial untuk melindungi anggotanya dari represi, yang memungkinkan nilai integritas menjadi norma sosial baru. Dengan demikian, Gen Z bukan hanya penerima nilai, melainkan produsen nilai yang mampu membentuk ruang sosial tandingan di luar negara.

Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa peluang Gen Z membentuk subkultur nilai antikorupsi muncul dari krisis legitimasi negara akibat kegagalan tata kelola publik. Kondisi ini menciptakan kekosongan moral yang dapat dimanfaatkan untuk membangun nilai tandingan, namun sekaligus dihadapkan pada hambatan kuat dari budaya hierarkis, kolektivistik, dan pewarisan sikap permisif terhadap korupsi. Hambatan ini menunjukkan adanya dominasi nilai koruptif yang telah membentuk kesadaran sosial sebagai hegemoni, dalam pengertian Gramsci. Perjuangan Gen Z membentuk subkultur nilai integritas karenanya bukan sekadar aksi moral, melainkan upaya membangun *counter-hegemony* yang menantang struktur sosial dominan. Proses ini memperlihatkan bahwa transformasi budaya hanya mungkin terjadi bila ada generasi baru yang berani menolak kesadaran dominan dan menawarkan tatanan makna baru.

Dengan mengintegrasikan ketiga pendekatan ini, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi kajian sosiologi dengan memandang perubahan nilai publik bukan hanya sebagai hasil reformasi struktural top-down, tetapi juga sebagai hasil resistensi generasional bottom-up. Konstruksi sosial menjelaskan mengapa budaya korupsi begitu mengakar; teori generasi menjelaskan bagaimana kesadaran nilai baru muncul dari pengalaman historis bersama; teori strukturasi menjelaskan bagaimana agen mampu mengubah struktur; dan teori hegemoni menjelaskan bagaimana nilai tandingan dibangun

untuk menantang dominasi. Konseptualisasi Gen Z sebagai *value guardian* melalui sintesis ini menjadi sumbangan penting yang memperbarui paradigma kajian antikorupsi: bahwa membangun integritas publik tidak cukup mengandalkan negara, tetapi memerlukan generasi baru yang membentuk subkultur nilai tandingan dari bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achim, M. V., Văidean, V. L., & Borlea, S. N. (2020). Corruption and health outcomes within an economic and cultural framework. *European Journal of Health Economics*, 21(2), 195–207. <https://doi.org/10.1007/s10198-019-01120-8>
- Artello, K., & Albanese, J. S. (2022). Culture of Corruption: Prosecutions, Persistence, and Desistence. *Public Integrity*, 24(2), 142–161. <https://doi.org/10.1080/10999922.2021.1881300>
- Bristow, J. (2016). The sociology of generations: New directions and challenges. In *The Sociology of Generations: New Directions and Challenges*. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-60136-0>
- Bukit, D. S., Keloko, A. B., & Ashar, T. (2021). Father's Support and Mother's Behavior in Stunting Prevention Efforts. *Journal of Health Science and Prevention*, 5(2), 100–105. <https://doi.org/10.29080/jhsp.v5i2.521>
- Fürstenberg, A., Starystach, S., & Uhl, A. (2023). Culture and corruption: An experimental comparison of cultural patterns on the corruption propensity in Poland and Russia. *European Journal of Criminology*, 20(5), 1719–1739. <https://doi.org/10.1177/14773708221081017>
- Garcia, A. R., Filipe, S. B., Fernandes, C., Estevão, C., & Ramos, G. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 1–24.
- Gitomer, A., Atienza-Barthelemy, J., & Foucault Welles, B. (2024). Youth activism and (de)personalized remix on TikTok. *Social Movement Studies*, 00(00), 1–19. <https://doi.org/10.1080/14742837.2024.2415672>
- Ha, Y. H., & Kumar, S. S. (2021). Investigating decentralized renewable energy systems under different governance approaches in Nepal and Indonesia: How does governance fail? *Energy Research and Social Science*, 80, 102214. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102214>
- Hasna, S. (2022). Tindakan Kolektif Masyarakat Jaringan Di Indonesia: Aktivisme Sosial Media Pada Aksi #Gejayanmemanggil. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 25–34. <https://doi.org/10.14710/interaksi.11.1.25-34>
- Hodgkinson, V. A., & Foley, M. W. (2003). The civil society reader. *The Civil Society Reader*, 1–362.
- Khatrri, D. B., Paudel, D., Pain, A., Marquardt, K., & Khatrri, S. (2022). Reterritorialization of

- community forestry: Scientific forest management for commercialization in Nepal. *Journal of Political Ecology*, 29(1), 455–474. <https://doi.org/10.2458/jpe.2298>
- Krolo, K. (2013). Manuel Castells, Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. In *Revija za sociologiju* (Vol. 42, Issue 3). <https://doi.org/10.5613/rzs.42.3.5>
- Longhofer, W., & Winchester, D. (2016). Social theory re-wired: New connections to classical and contemporary perspectives: Second edition. *Social Theory Re-Wired: New Connections to Classical and Contemporary Perspectives: Second Edition*, 1–541. <https://doi.org/10.4324/9781315775357>
- Muhammad Fadly, A. A. (2022). *Gerakan sosial, Sengketa Lahan, Masyarakat*. 2(2), 11–21.
- Naher, N., Hoque, R., Hassan, M. S., Balabanova, D., Adams, A. M., & Ahmed, S. M. (2020). Erratum: Correction to: The influence of corruption and governance in the delivery of frontline health care services in the public sector: a scoping review of current and future prospects in low and middle-income countries of south and south-east Asia (BM. *BMC Public Health*, 20(1), 1082. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09197-0>
- Nofrima, S., & Qodir, Z. (2021). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Studi Gerakan Gejayan Memanggil 2019. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1), 185–210. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i1.2163>
- Oktaviani, R. (2022). Partisipasi Politik Dan Gerakan Sosial (Studi Atas Partisipasi Mahasiswa Dalam Demo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Masa Pandemi Tahun 2020). *UIN Syafif Hidayatullah Jakarta*.
- Polydorou, I. (2023). *Master ' s degree in Human Rights and Multi-level Governance Y OUTH ' S R OLE IN S USTAINABILITY - . 2039403*, 1–93.
- Schnell, S., Kim, J., Munno, G., & Nabatchi, T. (2024). How citizens want to “see” the state: Exploring the relationship between transparency and public values. *Public Administration Review*, 84(2), 357–372. <https://doi.org/10.1111/puar.13769>
- Scholl, W., & Schermuly, C. C. (2020). The Impact of Culture on Corruption, Gross Domestic Product, and Human Development. *Journal of Business Ethics*, 162(1), 171–189. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3977-0>
- Simpser, A. (2020). The culture of corruption across generations: An empirical study of bribery attitudes and behavior. *Journal of Politics*, 82(4), 1373–1389. <https://doi.org/10.1086/708501>
- Subedi, M. S. (2019). Corruption In Nepal: An Anthropological Inquiry. *Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology*, 1(Amundsen 2000), 110–128. <https://doi.org/10.3126/dsaj.v1i0.283>
- Tinambunan, C. P., Syailendra, S., & Pratiwi, F. S. (2024). Analisis Perilaku Generasi Z dalam Menentukan Pilihan Politik. *Sosio E-Kons*, 16(3), 325. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v16i3.27069>